



Bupati Serahkan Bantuan kepada Desa Se-Badung

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan bantuan dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa se-Badung di Ruang Ker-

tha Gosana, Puspem Badung, Senin (13/3) kemarin. Besaran dana yang diserahkan untuk tahun anggaran 2017 ini senilai Rp 426 miliar lebih.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan dana desa, ADD dan dana bagi

hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Badung tahun anggaran 2017 ini, sejalan dengan program dari Bapak Presiden RI Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran atau dari desa. Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen mendukung pemerintahan desa, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat utamanya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa. "Kaitan dengan pemberian bantuan dana ini ke desa sudah dilakukan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di luar dari itu, desa juga bisa diberikan bantuan melalui dana BKK dan hibah," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, berkenaan dengan program Desa, Bupati Giri Prasta telah memprogramkan untuk menjadikan desa yang berdikari yakni desa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bupati juga mengharapkan desa



BANTUAN - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan bantuan kepada desa se-Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (13/3) kemarin.

mampu berinovasi, salah satunya dengan program OVOP (One Village One Product), sehingga potensi di desa itu dapat dikembangkan secara maksimal. Ke depan Bupati Giri Prasta juga merencanakan membuat Balai Latihan di desa, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa, khususnya kelompok-kelompok usaha kecil menengah. Untuk mengimplementasikan program tersebut, Pemkab akan siap membantu dari segi permodalan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Putu Gede Sridana melaporkan, maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah desa beserta para pemangku kepentingan di desa, khususnya terkait dengan adanya dana yang akan diserahkan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten yang dialokasikan ke desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Lebih lanjut dikatakan, besaran dana yang diserahkan ke desa sebesar Rp 426 miliar lebih, dengan rincian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (ADD) sebesar Rp 45, 2 miliar lebih. Bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah sebesar Rp 340,9 miliar lebih dan dana yang berasal dari APBN berupa dana Desa yang merupakan dana transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan langsung ditransfer ke desa sebesar Rp 40,3 miliar lebih. Perhitungan pengalokasian dana ke masing-masing desa dilakukan dengan proposional yaitu memperhatikan beberapa indikator antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat desa. (ad1242)

Edisi : Selasa, 14 Maret 2017

Hal : 2



Dermaga Gunaksa Belum Bisa Dioperasikan Komisi II Minta Penjelasan Eksekutif

RAPAT kerja Komisi II DPRD Klungkung berlangsung memanas, Senin (13/3) kemarin. Rapat yang membahas tentang Dermaga Gunaksa ini tidak menghasilkan solusi berarti, mengingat eksekutif belum siap untuk membeberkan teknis kendala dan apa yang sudah diusahakan. Hingga tahun 2017, Dermaga Gunaksa yang mulai dikerjakan sejak tahun 2008 tersebut belum juga dapat dioperasikan.

Kondisi ini pun membuat Komisi II memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada rapat kerja yang diselenggarakan di kantor DPRD Klungkung. Sayangnya, saat Ketua Komisi II DPRD Klungkung Komang Suantara meminta teknis permasalahan, pihak eksekutif tidak dapat memberikan jawaban memuaskan.

Pada kesempatan tersebut Komang Suantara didampingi Sekretaris Komisi II Buda Parwata menanyakan permasalahan teknis yang dihadapi Pemkab Klungkung hingga tidak bisa mengoperasikan Dermaga Gunaksa. Pasalnya, proyek yang direncanakan menghabiskan anggaran Rp 271,3 miliar ini seharusnya telah bisa beroperasi di tahun 2016 dengan rute menuju Dermaga Nusa Penida. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dioperasikan.

Menanggapi pertanyaan para wakil rakyat, Ketut Kara-

sedana, perwakilan Dishub Klungkung, menjelaskan rencana untuk dapat operasional sementara Dermaga Gunaksa telah ditindaklanjuti dengan pembuatan ruang tunggu sementara tahun 2016. Hanya saat melaksanakan uji coba pertama dengan menggunakan Kapal Nusa Jaya Abadi mengalami kegagalan sehingga dilaksanakan evaluasi kembali. Selanjutnya pada uji coba kedua dengan menggunakan Kapal LCT, secara kasat mata terlihat berhasil namun ada beberapa hambatan akibat faktor cuaca. "Waktu itu, rencananya ke depan akan dioperasikan khusus LCT. Akan ditambahkan pengikat di sisi lainnya agar kapal LCT bisa sandar lebih lama dan aman," jelasnya.

Pihaknya juga menyampaikan, proyek *multy years* yang berakhir tahun 2016 ini rencananya akan dilaksanakan serah terima tahun ini. Namun, pihaknya belum menindaklanjutinya mengingat Dermaga Gunaksa belum juga bisa dioperasikan. Selanjutnya disampaikan pada proyek Dermaga Gunaksa ini Pemkab Klungkung mendapatkan tanggung jawab untuk pengerjaan fasilitas daratnya. Sementara Kementerian dan Provinsi mengerjakan pembangunan di laut.

Terkait dengan fasilitas darat, Pemkab Klungkung belum berani membangun secara permanen mengingat

hingga saat ini belum bisa dilaksanakan normalisasi dan penguatan tanggul. "Banjir akan pengaruhi kekuatan bangunan itu sendiri. Perlu normalisasi agar tidak sampai terjadi banjir," bebernya.

Sementara itu pada permohonan akses jalan simpang Dermaga Gunaksa menyalahi Permen PU Nomor 19 Tahun 2011. Mengingat jarak simpang yang ada saat ini kurang dari yang telah ditetapkan. Selanjutnya disarankan untuk menggunakan akses jalan dari Desa Kusamba. Namun bila itu dilakukan, Pemkab Klungkung kembali harus melakukan pembebasan lahan. "Kita tetap akan menggunakan lahan yang sudah kita bebaskan. Namun, akses jalan kita melanggar Permen PU Nomor 19 Tahun 2011," terangnya.

Mendapatkan jawaban tersebut Komang Suantara meminta agar eksekutif mempersiapkan data teknis yang lengkap, agar rapat kerja dapat menghasilkan solusi yang berarti. Untuk itu pihaknya meminta kepada Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru untuk melaksanakan rapat susulan demi menyelesaikan permasalahan Dermaga Gunaksa ini. Menanggapi hal tersebut, Wayan Baru yang hadir saat itu meminta agar pada rapat selanjutnya eksekutif lebih siap sehingga rapat yang dilaksanakan dengan anggaran APBD Klungkung ini tidak mubazir. (ad1247)

Edisi : Selasa, 14 Maret 2017

Hal : 10



Dipanggil BK DPRD , Kicen Adnyana Mangkir

Semarang (Bali Post) -

Wayan Kicen Adnyana, anggota DPRD Klungkung, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Klungkung dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Menindaklanjuti kasus tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPRD Klungkung mengambil langkah setelah menerima surat dari penyidik Polres Klungkung. BK yang diketuai Komang Gde Ludra ini pun memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasinya, Senin (13/3) kemarin. Akan tetapi, Kicen Adnyana justru mangkir dari pemanggilan itu.

Terkait pemanggilan Kicen Adnyana, Komang Ludra mengaku sudah menerima dan mempelajari surat dari penyidik Polres. Karena itu pihaknya di BK DPRD Klungkung mengundang Kicen Adnyana untuk dimintai klarifikasi. Apalagi yang bersangkutan dikatakan punya hak bela diri, tetapi upaya pihak BK gagal. Sebab, setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 12.00 Wita, politisi dari Partai Gerindra itu tidak kunjung datang. Ludra mengaku sudah sempat men-

ghubungi Kicen Adnyana melalui ponselnya, tetapi juga tidak diangkat. Bahkan Sekwan Wayan Sudarta juga ikut menghubungi yang bersangkutan berulang kali, tetapi juga tidak diangkat. "Terakhir informasinya dari Sekwan, katanya beliau (Kicen — red) berada di Jakarta," ujar Komang Ludra.

Yang jelas, lanjut Ludra, Kicen Adnyana tidak memberikan alasan terkait ketidakhadirannya ke BK. Padahal BK dikatakan sudah melakukan koordinasi setelah

mendapat surat dari Polres Klungkung tiga hari lalu.

Pihaknya di BK DPRD juga hanya bisa memberikan sanksi tertulis, lisan dan sanksi berat jika yang bersangkutan melanggar norma dan kode etik. "Untuk sanksi berat juga tidak disebutkan seperti apa. Sanksi kita juga nantinya hanya dipakai acuan dari partainya," ujar Ludra.

Selain itu, menurut Ludra, anggota DPRD dapat diberhentikan jika meninggalkan duna, mengundurkan diri dan

bah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan di pura kawitan-nya yakni Merajan Sri Arya Kresna Kepaksan di Dusun Anjangan, Desa Getakan. Kicen sendiri ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Polres karena diduga sebagai "aktor" dari proposal fiktif tersebut.

Ironisnya, Kicen Adnyana tidak sendirian ditetapkan menjadi tersangka. Kedua anaknya yakni Ketut Kriasinia Adiputra yang duduk sebagai ketua panitia pembangunan dan Ni Kadek Endang Astiti sebagai bendahara juga ditetapkan jadi tersangka karena ikut terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Bahkan untuk mendalami kasus tersebut, penyidik Tipikor Polres Klungkung akan memanggil dan memeriksa Kicen, Selasa (14/3) ini sebagai tersangka. (kmb)



Bali Post/kmb

Komang Gde Ludra

Edisi : Selasa, 14 Maret 2017

Hal : 10



Bali Post



diberhentikan oleh partai. Jadi nasib Kicen Adnyana akan ditentukan oleh partainya sendiri.

Terkait sanksi dari BK, kata Ludra, tidak perlu menunggu sampai Kicen Adnyana diputuskan di pengadilan. BK bisa memberikan sanksi sebelum yang bersangkutan diputuskan bersalah atau tidak oleh pengadilan. Setelah dimintai klarifikasi oleh BK, hasilnya kemudian diplenokan dan dibawa ke paripurna. "Sesuai tata tertib dan kode etik, hanya boleh mem-PAW kalau dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi ketika sanksi dari kita tidak benar, kita ada pasal pemulihan untuk nama beliau," ujar Ludra seraya mengatakan akan mengundang Kicen lagi sambil melihat agenda di DPRD.

Sementara pascaditap-

kan jadi tersangka. Fraksi Gerindra di DPRD Klungkung juga mulai merapatkan barisan. Dipimpin Ketua DPRD Wayan Baru, mereka langsung menggelar rapat tertutup di ruang fraksi untuk mengambil langkah-langkah terkait kasus yang melibatkan Kicen Adnyana.

Ketua DPRD Wayan Baru yang juga Ketua DPC Gerindra Klungkung ketika dikonfirmasi sebelum rapat belum bisa memberikan penjelasan. Pihaknya mengatakan akan rapat dulu dengan anggota fraksi di DPRD. "Nanti ya, kita akan rapat dulu dengan anggota fraksi. Setelah itu baru kita beri keterangan," ujarnya.

Untuk diketahui, Kicen Adnyana ditetapkan jadi tersangka karena terlibat kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 200 juta. Dana hi-

Edisi : Selasa, 14 Maret 2017

Hal : 10